

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Setelah pelaksanaan PKL selama tiga bulan di KKP Pentatrust. Kesimpulan dari laporan tugas akhir yang berjudul “Pemahaman Prosedur *Tax Amnesty* untuk Memaksimalkan Manfaat Kebijakan Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak”, sebagai berikut :

1. *Tax Amnesty* merupakan sarana yang diberikan pemerintah bagi Wajib Pajak untuk mengungkap harta dan/atau kewajiban yang selama ini belum melaporkan di SPT Tahunan. Dengan fasilitas berupa penghapusan sanksi diharapkan para wajib pajak tertarik untuk mengikuti proram *Tax Amnesty*. Sehingga subjek maupun objek pajak akan semakin meningkat untuk tahun-tahun selanjutnya dan berakibat pada peningkatan pendapatan Negara.
2. Masih adanya itikad baik dari Wajib Pajak yang merasa belum melaporkan hartanya pada SPT Tahunan terakhir untuk mengungkapnya pada program Amnesti Pajak. Banyaknya animo masyarakat untuk mengikuti Amnesti Pajak ditandai dengan banyaknya antrian pada saat minggu-minggu terakhir periode *Tax Amnesty* saat melakukan PKL di Pentatrust.

3. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap kebijakan *Tax Amnesty* membuat manfaat kebijakan ini kurang maksimal. Sangat disayangkan apabila kebijakan dengan manfaat ekonomis yang sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak ini tidak dimanfaatkan dengan baik.

## **5.2. Saran**

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan seperti Amnesti Pajak tidak dilakukan secara berkala, oleh karena itu pemahaman Wajib Pajak terhadap kebijakan-kebijakan pajak perlu ditingkatkan agar Wajib Pajak dapat memaksimalkan manfaat *Tax Amnesty* tersebut. Dari segi ekonomis, manfaat yang diperoleh Wajib Pajak antara lain penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Wajib Pajak juga dibebaskan dari PPh jika ingin melakukan balik nama atas harta tambahan. Manfaat lainnya yaitu rasa aman dalam melaporkan harta, Wajib Pajak yang telah mengikuti Amnesti Pajak akan mendapatkan otoritas untuk bebas pemeriksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ard. Detikfinance. (2017, 30 Maret). Soal Tax Amnesty Tak Capai Target, Ini Kata Ditjen Pajak. Diakses pada tanggal 3 Juli 2018, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3460849/soal-tax-amnesty-tak-capai-target-ini-kata-ditjen-pajak>
- Dewan Perwakilan Rakyat, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ([http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2007\\_28.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf), diunduh 2 Juli 2018)
- Direktorat Jenderal Pajak, Bab 2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, ([http://www.pajak.go.id/sites/default/files/HKWP-Bab2\\_0.pdf](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/HKWP-Bab2_0.pdf), diunduh 2 Juli 2018)
- Direktorat Jenderal Pajak, 2017, 82. Bagaimana Pelaksanaan PP 36 Tahun 2017?, (<http://www.pajak.go.id/content/faq/21238/82-bagaimana-pelaksanaan-pp-36-tahun-2017>, diunduh 26 Juli 2018)
- Direktorat Jenderal Pajak, 2016, Amnesti Pajak, (<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>, diunduh 2 Juli 2018)
- Direktorat Jenderal Pajak, 2016, Formulir Amnesti Pajak V.3.10\_11\_2016, (<http://www.pajak.go.id/content/formulir-amnesti-pajak-v310112016>, diunduh 3 Juli 2018)
- Direktorat Jenderal Pajak, 2016, Handout Materi Amnesti Pajak, (<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Handout-Materi-Amnesti-Pajak.pdf>, diunduh 3 Juli 2018)

Direktorat Jenderal Pajak, 2016, Leaflet TA – Amnesti Pajak, (<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/Leaflet%20TA%20-%20Amnesti%20Pajak.pdf>, diunduh 3 Juli 2018)

Direktorat Jenderal Pajak, 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan, ([http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PP Nomor 36 Tahun 2017 0.pdf](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PP%20Nomor%2036%20Tahun%202017%200.pdf) diunduh 26 Juli 2018)

Ika, Aprillia. Kompas. (2017, 3 Maret). Ini 2 Kewajiban Tambahan bagi Wajib Pajak yang Sudah Ikut “Tax Amnesty”. Diakses pada tanggal 5 juli, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/03/073236226/ini.2.kewajiban.tambahan.bagi.wajib.pajak.yang.sudah.ikut.tax.amnesty>.)

Inspektorat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016, UU Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016, (<http://itjen.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2015/12/UU-Tax-Amnesty-No-11-tahun-2016.pdf>, diunduh 2 Juli 2018)

Laucereno, Sylke Febrina. Detikfinance. (2017, 29 Mei). Sri Mulyani: Ada Rp 2.067 T Harta Orang RI di Luar Negeri. Diakses pada tanggal 13 Juni 2017, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3514477/sri-mulyani-ada-rp-2067-t-harta-orang-ri-di-luar-negeri>

Pratiwi, Dhera Arizona. Okezonefinance. (2016, 13 Juli). UU Tax Amnesty Lahir akibat Panama Papers. Diakses pada tanggal 2 Juli 2018, dari <https://economy.okezone.com/read/2016/07/13/20/1437269/uu-tax-amnesty-lahir-akibat-panama-papers>

Pratomo, Harwanto Bimo. Merdeka. (2016, 5 April). Mantan Menteri hingga Pengusaha Tajir RI Masuk Daftar Panama Papers. Diakses pada tanggal 3 Juli 2018, dari <https://www.merdeka.com/uang/mantan-menteri-hingga-pengusaha-tajir-ri-masuk-daftar-panama-papers.html>

Simorangkir, Eduardo. Detikfinance. (2017, 18 Juli). Gencar Bangun Infrastruktur, Jokowi Genjot Pertumbuhan Ekonomi RI. Diakses pada tanggal 3 Juli 2018, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3565161/gencar-bangun-infrastruktur-jokowi-genjot-pertumbuhan-ekonomi-ri>